Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302-0172
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 10 Pages pp. 91- 100

ANALISIS KESENJANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH

Mahrizal[1)], Abubakar Hamzah[2)], Sofyan Syahnur.[3)]
[1)]Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
[2,3)]Dosen Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Email: mahrizalidris@yahoo.co.id

Abstract: *Growing income gap has led to various problems such as rising unemployment, lack of health and education, housing, basic needs and security. So that the author wishes researching on the development of economic growth and development of the population that influence the income gap among districts / cities in Aceh province. Location of the research conducted in the province of Aceh, using secondary data obtained from the office of the Central Bureau of Statistics Aceh. For purposes of analysis used modeling approaches Williamson index and convergence analysis results showed that the disparity of per capita GDP among the districts / cities in Aceh province during the period 2002-2011 has the highest value of 0.839 and the lowest 0.747 Aceh province including high level of inequality criterion. Trend GDP per capita disparity continues to decline but are fluctuations from year to year. By looking at the convergence coefficient beta = 0.0637 which is positive, confirms that there has been a divergence rather than convergence occurs in GRDP per capita disparities between districts / cities in Aceh province. Based on the results of research that has been done, then the need is to reduce the gap and seek to create konvegensi through the efforts of physical development and human resources equally on each district / city in order to overcome the development gap .*
Keywords: *GDP and Population*

Abstrak: Kesenjangan pendapatan yang semakin besar telah menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya pengangguran, kurangnya sarana kesehatan dan pendidikan, perumahan, kebutuhan pokok dan rasa aman. Sehingga penulis berkeinginan meneliti mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan penduduk yang mempengarui kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Aceh, dengan menggunakan data skunder yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik Aceh. Untuk keperluan analisis digunakan pendekatan model Indeks Williamson dan analisis konvergensi Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disparitas PDRB Per Kapita antar kabupaten/ kota di Provinsi Aceh selama kurun waktu 2002-2011 memiliki nilai tertinggi sebesar 0,839 dan terendah 0,747 maka Provinsi Aceh termasuk kriteria ketimpangan taraf tinggi. Trend disparitas PDRB per kapita terus menurun namun secara fluktuasi dari tahun ke tahun. Dengan melihat koefisien konvergensi beta = 0,0637 yang bernilai positif, menegaskan bahwa telah terjadi divergensi bukannya terjadi konvergensi dalam disparitas PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka yang perlu adalah memperkecil kesenjangan dan berupaya menciptakan konvegensi melalui upaya pembangunan fisik dan sumber daya manusia yang merata disetiap kabupaten/kota guna mengatasi kesenjangan pembangunan.

Kata Kunci: PDRB dan Jumlah Penduduk

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara sedang berkembang, dimana pendapatan per kapitanya masih rendah sehingga pemerintah perlu menitik beratkan prioritas pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Daerah-daerah di Indonesia mempunyai kemampuan yang berbeda untuk membangun daerahnya sendiri. Perbedaan tersebut terutama dipengaruhi oleh potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah, seperti sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya sosial serta faktor lainnya, sehingga tingkat perkembangan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang dicapai masyarakat di masing-masing daerah tidak sama. Pada akhirnya hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan pendapatan regional, dimana wilayah miskin memiliki pendapatan yang lebih rendah dari wilayah yang lebih berkembang.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, dan semakin kecilnya kesenjangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor. Apabila kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah lebih mengutamakan pertumbuhan akan mengakibatkan semakin tingginya tingkat kesenjangan yang terjadi bahkan menimbulkan pendapatan yang tidak merata di setiap daerah. Pembangunan ekonomi daerah pada hakekatnya melakukan pembahasan mengenai dua hal yaitu berkaitan dengan metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu. Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, enterpreuneurship, transportasi, komunikasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, pasar ekspor, situasi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat dan bantuan (Arsyad, 72:2010).

Faktor sumberdaya yang beranekaragam mengakibatkan pembangunan nasional sebaiknya tidak hanya dilaksanakan secara terpusat tetapi perlu berorientasi pada pembangunan regional. Keputusan yang diambil pemerintah pusat semakin memperbesar inefisiensi karena banyak proyek yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Sehingga Konsep Trilogi Pembangunan belum berhasil secara signifikan untuk mengurangi kesenjangan. Dampak dari kesenjangan tersebut membuat beberapa daerah merasa diperlakukan tidak adil. Kesenjangan pendapatan yang semakin besar telah menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya pengangguran, kurangnya sarana kesehatan dan pendidikan, perumahan, kebutuhan pokok, rasa aman dan lain-lain.

Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan untuk mengarahkan program pembangunan sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui kebijakan desentralisasi yang diwenangkan kepada pemerintah daerah. Namun, tidak semua daerah dapat menghasilkan program-program yang efektif dan efisien untuk memacu pertumbuhan dan menciptakan pemerataan. Sasaran

pembangunan yang lebih ditujukan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pendekatan membangun pusat-pusat pertumbuhan ternyata disisi lain telah menimbulkan masalah yang semakin kompleks. Pusat-pusat pertumbuhan ternyata tidak tumbuh bersama-sama secara seimbang.

Provinsi Aceh merupakan salah satu Provinsi dalam wilayah Indonesia yang memiliki kontribusi pendapatan yang masih kecil dibandingkan dengan sebagian propinsi lain di Indonesia. Keadaan ini dapat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi Aceh secara keseluruhan. Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar untuk pembangunan ekonomi yang ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana informasi dan kelembagaan yang memadai. Namun demikian didalam perspektif pembangunan ekonomi, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa Aceh masih memerlukan upaya-upaya nyata untuk mengakselerasi laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Masalah kesenjangan tidak hanya menimbulkan permasalahan ekonomi dan sosial namun juga dapat menyebabkan ketidak stabilan politik dan disintegrasi sehingga pemerintah menyadari bahwa masalah ini sangat penting untuk ditanggulangi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa besarkah tingkat kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh?
2. Bagaimanakah trend kesenjangan pendapatan antar kabubupaten/kota di Provinsi Aceh?
3. Bagaimanakah konvergensi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh?

STUDI KEPUSTAKAAN

Konsep Dasar Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi tidak dapat diartikan sama dengan pertumbuhan ataupun industrialisasi. Pembangunan ekonomi berarti pertumbuhan ditambah dengan terjadinya perubahan-perubahan (grow plus change), karena adanya dimensi-dimensi kualitatif yang cukup penting dalam proses pembangunan tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Indikator dari laju pertumbuhan ekonomi suatu negara salah satunya ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto.

Syarat utama bagi pembangunan adalah proses pertumbuhannya harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam negeri. Sehingga pembangunan yang terjadi tidak bersifat bias karena misalkan mengandalkan

dana dari utang luar negeri. Walaupun terjadi perubahan dalam pembangunan, namun bukan merupakan hasil bersih karena masih harus dikurangi dengan pembayaran utang dan bunga. Keberhasilan pembangunan ekonomi menurut Todaro (52:2003) ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu: (1) perkembangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs); (2) meningkatkan rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia, dan; (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Ketiga hal tersebut merupakan tujuan pokok yang harus tercapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan. Ketiganya berkaitan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang terwujud dalam berbagai macam manifestasi (bentuk) di hampir semua masyarakat dan budaya sepanjang jaman.

Konsep Dasar Kesenjangan Pendapatan Antar Wilayah

Kesenjagan pendapatan merupakan perbedaan tingkat PDRB antar kabupaten/kota yang tidak seimbang hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan jumlah penduduk. Menurut Thee Kian Wie, (99:1981) menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan dari sudut pandangan ekonomi dibagi menjadi :

1. Ketimpangan pembangian pendapatan antar golongan penerima pendapatan *(size distribution oncome)*;
2. Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan (*urban-rural income disparities)*;
3. Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah (*regional income disparities)*;

Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah dengan daerah lain merupakan suatu yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah (Williamson, 24:1965). Analisis yang menghubungkan tahap pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan serta ungkapan pertumbuhan versus pemerataan sebenarnya dipicu oleh sebuah penemuan yang dimulai oleh Simon Kuznet (34:1955). Simon Kuznet menghubungkan laju pertumbuhan berbagai negara maju dan negara sedang berkembang dengan mengamati data time series untuk Amerika, Inggris dan Jerman serta data cross section yang mencakup tiga negara tersebut ditambah India, Srilangka serta Puerto Rico dan pada hasil pengamatan tersebut Kuznet menemukan sebuah pola yang berbentu U terbalik. Pola tersebut mensyaratkan bahwa pada tahap awal perkembangan (diwakili oleh PDB per kapita yang masih rendah), maka proses pertumbuhan diikuti oleh semakin memburuhnya distribusi pendapatan dan setelah mencapai titik tertentu, pembangunan akan diikuti oleh membaiknya pemerataan. Pembangunan dengan hasil seperti yang

digambarkan oleh hipotesisi U terbalik, sebagian besar didasarkan pada model pembangunan Dualistik (Munawar Ismail, 154: 1995).

Konvergensi Mutlak dan Bersyarat

Dalam konsep pertumbuhan ekonomi, konvergensi pertumbuhan adalah kecenderungan perekonomian-perekonomian daerah miskin tumbuh lebih cepat dibanding perekonomian daerah kaya. Sehingga diharapkan perekonomian daerah miskin akan mengejar ketertinggalan dan ketimpangan perekonomian antar daerah akan menurun. Model standar pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan tergantung dari perekonomian awal. Hubungan yang negatif antara pendapatan dengan tingkat pertumbuhan berarti daerah kaya mengalami pertumbuhan ekonomi rendah yang menunjukkan pendapatan cenderung konvergen secara mutlak. Proses konvergen seperti ini disebut dengan konvergensi mutlak (Absolut Convergence). Oleh karena kenyatannya bahwa antar daerah mempunyai karakteristik perekonomian yang beragam mengakibatkan dugaan proses konvergensi mutlak pada umumnya diikuti oleh konvergensi bersyarat (Conditional Convergence) (Romer, 75:2006).

Terdapat dua konsep utama konvergensi dalam perekonomian, yaitu sigma (σ) corvengence dan beta (β) convergence. Kegunaan sigma convergence adalah untuk mengukur tingkat dispersi dari pertumbuhan. Sedangkan kegunaan beta convergence adalah untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor yang diperkirakan menentukan tingkat konvergensi. Prosedur untuk menguji beta convergence adalah dengan terlebih dahulu mencari tahu apakah terdapat konvergensi nonkondisional (unconditional convergence) atau konvergensi absolut (absolute convergence). Kemudian barulah menguji "'konvergensi yang dapat dijelaskan" (explained convergence) atau konvergensi kondisional (conditional convergence).

Konvergensi absolut dilakukan dengan mengestimasi model ekonometrika dimana varibel dependen awal periode (initial conditionaI) sebagai satu-satunya variabel penjelas bagi variabel dependen. Sedangkan konvergensi kondisional dilakukan dengan mengikutsertakan sejumlah variabel penjelas dalam pengujian selain variabel dependen awal periode.

Konvergensi bruto atau sigma (σ) diukur dengan menggunakan ukuran dispersi yang dalam hal ini adalah koefisien variasi dan standar deviasi dari nilai logaritma variabel dependen. Spesifikasi model yang digunakan untuk konvergen absolut adalah:

$$Yit = \beta 0 + \beta 1\, Y(i,t-1) + e_{i,t}$$

dimana variabel dependen adalah pertumbuhan PDRB dengan variabel penjelasnya pertumbuhan PDRB awal periode Y(i,t-1). Jika koefisien tersebut negatif dan signifikan secara statistik maka dikatakan σ convergence telah terjadi dengan implikasi dalam konteks Provinsi Aceh, kabupaten/kota dengan tingkat awal PDRB per kapita yang rendah cenderung

mengejar ketertinggalannya dari kabupaten/kota yang tingkat awal PDRB per kapitanya tinggi. Untuk menghitung β convergence menurut Barro dan Martin dalam Fitria (88:2006) adalah:

$$\beta = \frac{[Ln\ (\beta 1 + 1)]}{T}$$

dimana β1 adalah koefisien variabel penjelas dan T adalah lama periode waktu. β convergence atau konvergensi bersyarat (kondisional) adalah koefisien tingkat awal PDRB per kapita bila laju pertumbuhan PDRB per kapita diregresi terhadap tingkat awal PDRB per kapita dan variabel bebas sebagai control seperti kondisi awal anggaran belanja pemerintah, angka harapan hidup dan tingkat partisipasi SMP per kapita (tingkat pendidikan). β convergence mensyaratkan faktor-faktor awal yang harus dipenuhi agar konvergensi itu terjadi.

Saldana dalam Tambunan (98:2003) menyatakan bahwa pada saat σ convergence terjadi maka β convergence juga terjadi. Namun tidak sebaliknya σ convergence tidak selalu terjadi apabila β convergence terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan di provinsi Aceh dengan ruang lingkupnya meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Fokus penelitian adalah PDRB, indek kesenjangan pendapatan, dan konvergensi antar kabupaten/kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder periode tahun 2002-2011 yang mencakup 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain meliputi jumlah penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Kabupaten/kota dan Provinsi Aceh

Analisis Kesenjangan Pendapatan

Kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson dimana suatu fungsi yang menganalisis mengenai kesenjangan dan trend indeks kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota. Rumus dari Indeks Williamson adalah sebagai berikut:

$$CVw = \frac{\sqrt{\sum (Yi - \bar{Y})^2\ fi / n}}{\bar{Y}}$$

dimana:

CVw = Indeks Williamson Kabupaten/Kota
fi = Jumlah penduduk kabupaten/kota ke-i
n = Jumlah penduduk Provinsi Aceh (jiwa)
Yi = PDRB per kapita kabupaten/kota ke-i
Ỹ = PDRB per kapita Provinsi Aceh

Semakin besar nilai Indeks Williamson yaitu mendekati 1 berarti semakin tinggi ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh, sebaliknya semakin rendah tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi maka Indeks

Williamson akan semakin mendekati 0 dimana CVw < 0,35 = Kesenjangan taraf rendah,CVw 0,35 ≤ CVw ≤ 0,5 = kesenjangan taraf sedang dan CVw > 0,5 = Kesenjangan taraf tinggi

Analisis Trend Ketimpangan

Trend ketimpangan diamati dari perkembangan nilai indeks ketimpangan pendapatan yang diperoleh dari hasil perhitungan CV Williamson yang kemudian digambarkan dalam sebuah grafik. Berdasarkan grafik tersebut, kemudian dianalisis secara deskriptif bagaimana trend ketimpangan yang terjadi.

Analisis Konvergensi

Pengujian konvergensi absolut untuk mengetahui apakah daerah miskin tumbuh lebih cepat dibanding dengan daerah kaya, menggunakan analisis sebagai berikut (Romer, 87:2006):

$$Ln\left(\frac{Y_{(i,t)}}{Y_{(i,t-1)}}\right) = a + b\ Ln\ Y_{(i,t-1)} + e_i$$

dimana:

$Y_{(i,t)}$ = PDRB per kapita daerah i tahun t

$Y_{(i,t-1)}$ = PDRB per kapita daerah i t tahun t-1.

a = Konstanta

b = Koefisien regresi, jika nilai b < 0 akan terjadi kecenderungan konvergen

Analisis Kesenjangan Pendapatan Antar Wilayah di Provinsi Aceh

Kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson. Rumus dari Indeks Williamson. Semakin besar nilai Indeks Williamson yaitu mendekati 1 berarti semakin tinggi ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh, sebaliknya semakin rendah tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi maka Indeks Williamson akan semakin mendekati 0. kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah kesenjangan ada pada taraf rendah, sedang atau tinggi dengan kriteria sebagai berikut: CVw < 0,35 = Kesenjangan taraf rendah ,CVw 0,35 ≤ CVw ≤ 0,5 = Kesenjangan taraf sedang CVw > 0,5 = Kesenjangan taraf tinggi

Tabel 4.9:Indek Williamson tahun 2002-2011

Tahun	Indeks Williamson
2002	0,835
2003	0,839
2004	0,816
2005	0,752
2006	0,792
2007	0,772
2008	0,753
2009	0,757
2010	0,750
2011	0,747

Dari Tabel 4.9 di atas menerangkan

secara indeks Williamson dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesenjangan wilayah terjadi taraf tinggi yang melebihi nilai 0.50 atau mendekati 1 mulai tahun 2002 sampai 2011. Secara perkembangan dari tahun ke tahun menerangkan bahwa nilai indeks Williamson terus menurun dimana pada tahun 2002 sebesar 0.835 pada tahun 2004 sebesar 0.816 di tahun 2005 menjadi 0.752 dan di tahun 2011 menjadi 0.747 secara keseluruhannya terjadi fluktuasi menuju penurunan kesenjangan namun penurunannya relatif kecil.

Perkembangan Indeks Williamson Kesenjangan Pendapatan

Grafik 4.3: Indeks Williamson Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 2002-2011

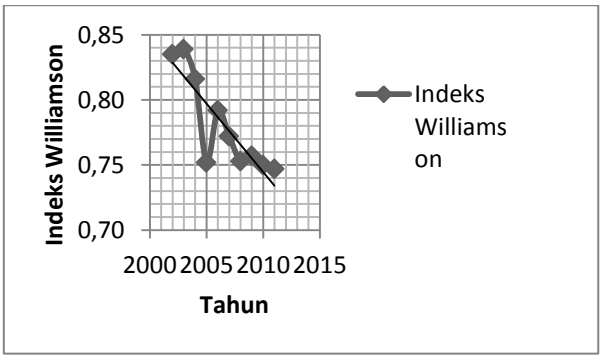

Sumber: Hasil Diolah dari Data hasil Indeks Williamson

Secara grafik kita bisa melihat terjadinya fluktuasi penurunan dari tingkat kesenjangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Aceh, dimana dari kesimpulan di atas menyatakan bahwa tingkat kesenjangan terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh terjadi sangat tinggi dengan nilai hampir mencapai angka 1 atau secara rata-rata keseluruhan mencapai 0,78. Untuk lebih jelas tercermin dalam grafik 4.3 di bawah ini:

Analisis Konvergensi Pendapatan Antar Wilayah di Provinsi Aceh

Dalam mengukur konvergensi Beta (β) PDRB Per Kapita yaitu dengan rumus : $\beta = \frac{\lfloor Ln\ (b+1) \rfloor}{T}$ Dimana, b adalah koefisien variabel prediktor dan T adalah lama periode waktu. Mengacu pada estimasi antara PDRB per kapita dengan PDRB per kapita tahun sebelumnya, maka yang menjadi koefisien dari prediktor adalah sebesar 0,892. Kemudian angka ini dimasukkan dalam rumus mencari beta konvergensi sehingga menjadi sebagai berikut.

$$\beta = \frac{\lfloor Ln\ (0.892 + 1) \rfloor}{10}$$

$$\beta = \frac{0.637}{10}$$

$$\beta = 0.0637$$

Hasilnya bahwa nilai konvergensi beta dimana 0,0637 memiliki arti disparitas yang terjadi cenderung meningkat sebesar 0,0637 sehingga konvergensi tidak terjadi. Nilai beta konvergensi absolut tersebut bernilai positif merupakan cerminan terjadinya divergensi atau kecenderungan semakin meningkat dalam disparitas PDRB per kapita antar kabupaten/ kota di Provinsi Aceh

Kesimpulan

1. Disparitas PDRB Per Kapita antar kabupaten/ kota di Provinsi Aceh selama kurun waktu 2002-2011 memiliki nilai tertinggi pada tahun 2003 sebesar 0,839 dan paling rendah di tahun 2011 dengan nilai 0,747 maka berdasarkan nilai tersebut Provinsi Aceh termasuk kriteria ketimpangan taraf tinggi. Jika hal ini terus dibiarkan maka dikhawatirkan terjadi ketimpangan yang melebar pada periode yang akan datang, yang ditunjukkan oleh kecenderungan trend disparitas PDRB per kapita
2. Trend disparitas PDRB per kapita yang terus menurun namun secara fluktuasi dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 dengan slope garis trend yang negati yaitu 0,078 dari tahun ke tahun
3. PDRB per kapita di Provinsi Aceh tidak mengalami konvergensi apabila dilihat dari tingkat dispersi PDRB per kapita 23 kabupaten/kota (berdasarkan koefisien variasi dan standar deviasi) yang terus meningkat, selanjutnya konvergensi bruto tidak terjadi pada PDRB per kapita 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama tahun 2002-2011. Dengan melihat koefisien konvergensi beta = 0,0637 yang bernilai positif, menegaskan bahwa telah terjadi divergensi bukannya terjadi konvergensi dalam disparitas PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
4. Koefisien PDRB per kapita 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun sebelumnya sebesar 0,892, memiliki arti bahwa setiap peningkat PDRB per kapita 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun sebelumnya sebesar 1 milyar, akan berdampak pada peningkatan PDRB per kapita 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebesar 0.892 milyar.

Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian di atas adalah:

1. Alokasi investasi juga harus dilihat berdasarkan potensi daerah yang belum diupayakan sehingga mampu memberikan nilai tambah yang baru terhadap pembentukan PDRB daerahnya yang berujung pada peningkatan PDRB per kapita. Sehubungan dengan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam mempercepat proses konvergensi PDRB per kapita di Provinsi Aceh, yaitu dengan pola pertumbuhan yang tidak seimbang pada besarnya alokasi investasi untuk meningkatkan PDRB per kapita.
2. Dibukanya lapangan kerja yang padat karya dengan mempertimbangkan pemerataan fisik dan sarana pendidikan di setiap kabupaten/kota juga merupakan upaya yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerataan dalam fasilitas pendidikan akan dapat membantu mempercepat proses konvergensi antar daerah.

3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan salah satu faktor produksi bagi pembangunan ekonomi melalui menambah pengetahuan/kemampuan Masyarakat dengan cara memperbanyak penyuluhan, kursus gratis dan lain-lain sehingga dapat menggunakan teknologi dalam melakukan pekerjaan dan dapat lebih mengefisienkan penggunaan tenaga, waktu dan biaya yang pada akhirnya akan menambah pendapatan masyarakat sehingga kesenjangan distribusi pendapatan semangkin mengecil.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Achmad, R.N. 1999. Kesejangan Pengeluaran Pembangunan Antar Wilayah dan Propinsi di Indonesia, Jurnal **Ekonomi dan Keuangan Indonesia**. Volume XLVII, Nomor 4.

Boediono. 1985. **Teori Pertumbuhan Ekonomi**. BPFE-UGM, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Aceh. 2011. Aceh Dalam Angka. BPS Provinsi Aceh, Aceh.

Boediono, 1985, **Teori Pembangunan Ekonomi**, Seri Sinopsis. Pengantar Ekonomi No.40. BPFE, Yogyakarta.

Gujarati. 2003. Ekonometrika Dasar. Erlangga, Jakarta.

Glasson, J. 1997. **Pengantar Perencanaan Regional**, diterjemahkan Paul Sitohang, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Gujarati, D. 2003. **Basic Econometric**, (Fourth edition), USA, Mc Graw-Hill Internatonal.

Hanafiah, T. 1998. **Pendekatan Wilayah dan Pembangunan Perdesaan**, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Irwan dan Suparmoko. 1987. **Ekonomi Pembangunan**. Liberty, Yogyakarta.

Romer, D. 2006. Advanced Macroeconomis. Edisi Ketiga. Mc Graw.

Richarson, H.W.2001. **Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional**, (diterjemahkan Paul Sitohang), Edisi Revisi 2001. Fakultas Ekonomi Univesrsitas Indonesia, Jakarta.

Sukirno, S. 2000. ***Ekonomi Makro***. Raja Grapindo Persada, Jakarta.

Todaro, M. P. 2003. **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**. Julid 1, Edisi Kedelapan. Erlangga, Jakarta.

----------, 2006, ***Pembangunan Ekonomi,*** Erlangga. Jakarta.

Triyanto W, dan Hg. Suseno. 1991. **Indikator Ekonomi**. Kansisus, Yogyakarta.

Tadjoeddin, M. Z., W. I. Suharyo, dan S. Mishra. 2001. Aspirasi terhadap Ketidakmerataan: Disparitas Regional dan Konflik Vertikal di Indonesia, UNSFIR Working Paper-Jakarta.

Tambunan,T.T.H. 2003. **Perekonomian Indonesia Beberapa Permasalahan Penting**. Ghalia Indonesia, Jakarta.